

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.161 km, terpanjang kedua di dunia. Setiap pulau maupun daerah di Indonesia memiliki kekayaan, keindahan alam serta keunikan yang beraneka ragam. Kekayaan tersebut dapat diolah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara, salah satunya melalui sektor pariwisata.

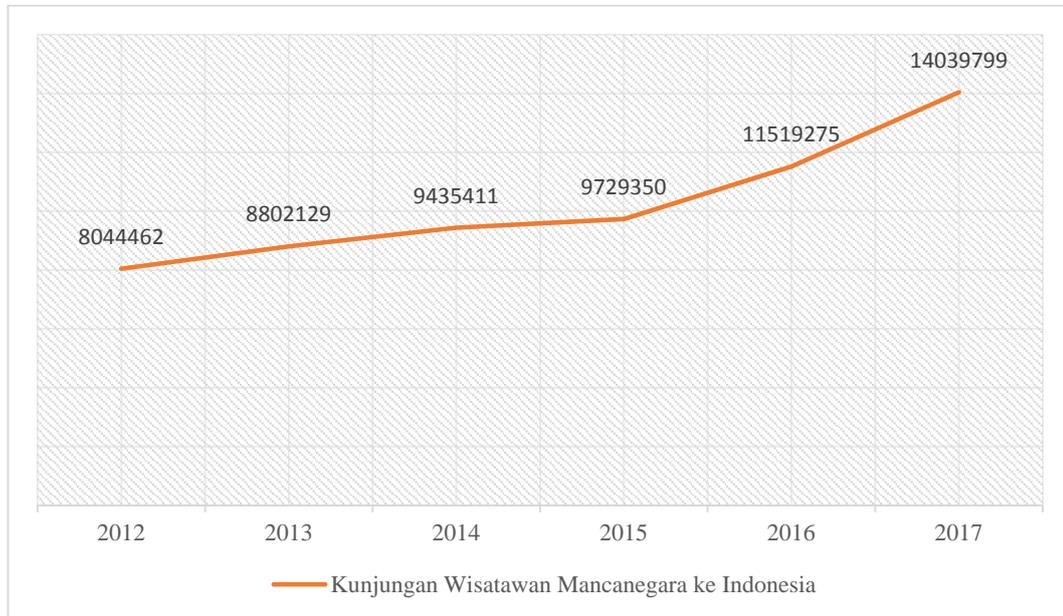
Damanik dan Weber menyatakan bahwa pariwisata dalam arti luas adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Menurut Mathieson dan Wall, pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada di tempat tujuan dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (dalam Tatang, 2014:13).

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah memberikan sumbangsih untuk meningkatkan devisa maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi, sosial, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan budaya. Kegiatan pariwisata sangat berperan

dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi wisata. Kegiatan pariwisata juga berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Kegiatan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan sosial, ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, adat istiadat, dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kementerian Pariwisata Tahun 2016, data statistik per Januari sampai dengan Desember 2016 menunjukkan capaian pembangunan pariwisata Indonesia mampu melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016 secara kumulatif sebanyak 12.023.971 kunjungan dengan pertumbuhan sebesar 15,54%. Pada periode yang sama, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara pada beberapa negara ASEAN adalah sebagai berikut: Thailand 9,7%; Singapura 7,9%, dan Malaysia 4,4%. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berkontribusi terhadap penerimaan devisa sebesar 176-184 triliun rupiah (prognosa).

Gambar 1.1
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah.

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selalu meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tren positif mengingat dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 18.39% dan 21.88%. Sementara itu, pariwisata Indonesia tidak terfokus pada satu wilayah saja, namun Indonesia memiliki 34 provinsi mulai dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan adalah Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari data jumlah wisatawan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012–2016

Tahun	Wisatawan				Jumlah
	Mancanegara	(persentase)	Domestik	(persentase)	
2012	363.150	1,41 %	25.240.007	98,59 %	25.603.157
2013	388.143	1,30 %	29.430.609	98,70 %	29.818.752
2014	419.584	1,38 %	29.852.095	98,62 %	30.271.679
2015	375.166	1,17 %	31.432.080	98,83 %	31.807.246
2016	578.924	1,54 %	36.899.776	98,56 %	37.478.700

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2017, diolah.

Seperti terlihat pada tabel 1.1, tren jumlah wisatawan di Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Provinsi Jawa Tengah cukup menjanjikan untuk menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yang besar antara jumlah wisatawan domestik dan jumlah wisatawan mancanegara.

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota perkembangannya pesat di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa. Kota Semarang sebagaimana kota-kota besar lainnya di Indonesia juga mempunyai kawasan penyangga yang dikenal dengan nama Kedungsapur, yaitu

Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Grobogan. Kota-kota tersebut total jumlah penduduknya sekitar 6 juta jiwa, sehingga merupakan Wilayah Metropolis terpadat ke 4 setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya.

Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah memiliki daya tarik tersendiri pada sektor pariwisata. Berbagai macam destinasi wisata yang dimiliki Kota Semarang mampu memancing kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Kunjungan Wisatawan Ke Kota Semarang

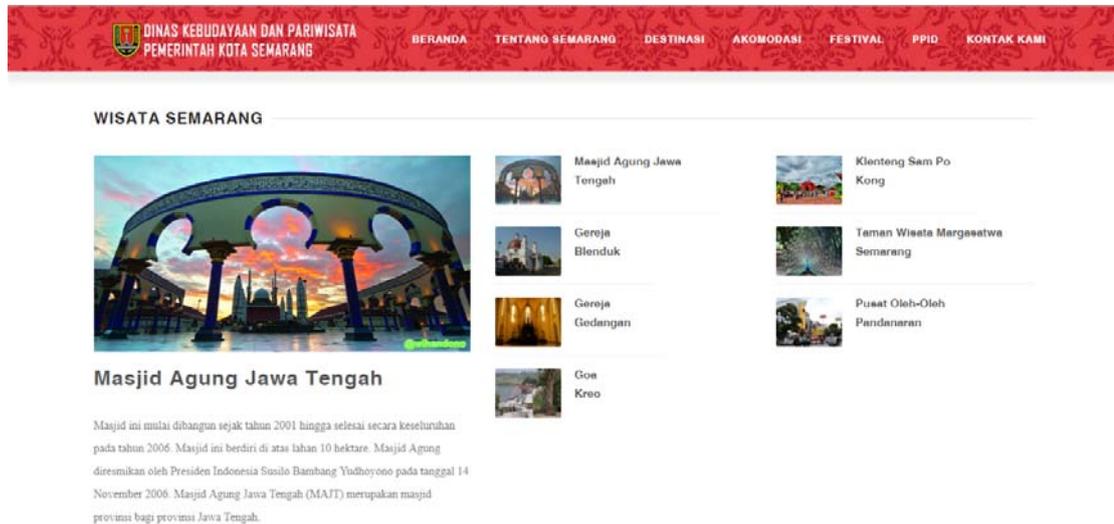
Tahun	Kunjungan Wisatawan	Kenaikan	Persentase Kenaikan
2010	1.909.923	-	-
2011	2.100.923	191.000	10,00 %
2012	2.712.442	611.519	29,10 %
2013	3.192.099	479.657	17,68 %
2014	4.007.192	815.093	25,53 %
2015	4.376.359	369.167	9,21 %

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke Kota Semarang menunjukkan kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga tahun 2015, kunjungan wisatawan meningkat lebih dari dua juta kunjungan. Tercatat pada tahun 2010 kunjungan wisata ke Semarang sebanyak 1.909.923 meningkat pada tahun 2015 menjadi 4.376.359. Kota Semarang memang memiliki tempat-tempat yang dapat dinikmati dan dieksplorasi keindahannya baik wisata alam, budaya, sejarah, seni, kearifan lokal dan lainnya. Keberagaman destinasi wisata di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Destinasi Wisata Kota Semarang



Sumber: Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang,

<https://pariwisata.semarangkota.go.id/index.php>, diakses pada 3 Mei 2018 pukul 22:50

Gambar 1.2 menunjukkan beberapa destinasi Kota Semarang yang dipublikasikan melalui website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Di satu sisi, Kota Semarang memiliki destinasi wisata unggulan seperti Lawang Sewu, Klenteng Sampookong, kawasan wisata Kota Lama hingga Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Namun disisi lain, terdapat beberapa desa wisata sebagai alternatif destinasi wisata di Kota Semarang.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengertian desa wisata tersebut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor

: Pm.26/Um.001/Mkp/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Kota Semarang memiliki 3 (tiga) desa dan 7 (tujuh) kampung wisata yang dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Perbedaan antara Desa Wisata dan Kampung Wisata terletak pada landasan hukum yang dimiliki. Desa Wisata memiliki Surat Keputusan (SK) Desa Wisata dan Surat Keputusan (SK) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diputuskan oleh Walikota. Sementara Kampung Wisata hanya memiliki Surat Keputusan (SK) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diputuskan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun 3 (tiga) Desa Wisata yang dimiliki Kota Semarang, yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Nongkosawit, dan Desa Wisata Wonolopo, sedangkan 7 (tujuh) Kampung Wisata, yaitu Kampung Jamalsari, Kampung Anggrek, Kampung Tapak Tugurejo, Kampung Jatirejo, Kampung Cepoko, Kampung Jamu Bubakan, dan Kampung Kreo. Desa dan Kampung Wisata memiliki keunggulan dan daya tarik masing-masing yang mendukung Kota Semarang sebagai daerah destinasi wisata dengan *branding*-nya *Semarang Variety of Culture*.

Desa Nongkosawit merupakan salah satu dari 3 (tiga) desa wisata yang dimiliki Kota Semarang. Desa Nongkosawit ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/407 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Terletak di Kecamatan Gunungpati yang letaknya sekitar 15 km dari pusat Kota

Semarang. Demografi Kelurahan Nongkosawit terdiri dari 5 RW dan 21 RT serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.991 jiwa.

Sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Kota Semarang, wilayah ini memiliki tujuh potensi hasil temuan yang layak menjadi daya tarik wisata, seperti wisata religi, budaya, alam, industri rumahan, ternak, dan kuliner. Di Nongkosawit, ada empat soko guru yang dikenal sebagai masjid wali dan petilasan peninggalan Syaikh Hasan Munadi. Tokoh penyebar agama Islam di Nongkosawit ini juga sebagai penemu sumber mata air di Desa Nyatnyono, di kaki Gunung Ungaran. Desa Wisata Nongkosawit terbagi menjadi beberapa klaster wisata sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap wilayah RW (Rukun Warga). Wilayah RW 1 merupakan klaster seni budaya dan edukasi, terutama di bidang agrowisata. RW 2 memiliki lapangan bola yang bisa digunakan untuk bumi perkemahan dan wisata alam. Adapun RW 3 merupakan industri rumahan penghasil keripik. Pada wilayah RW 4 terdapat homestay dan rumah joglo sekaligus untuk pengembangan kesenian tradisional. Sementara itu, wilayah RW 5 merupakan klaster kuliner yaitu di sepanjang Jalan Manyaran-Gunungpati yang memproduksi tape dan klepon.

Desa Wisata Nongkosawit memiliki banyak potensi pariwisata yang beraneka ragam, namun potensi itu belum diolah secara optimal, hal ini dapat terlihat dari gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3

Gapura Desa Wisata Nongkosawit Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Tahun 2016

Gambar 1.3 menunjukkan kondisi pintu masuk atau gapura dari Desa Wisata Nongkosawit terlihat cukup memprihatinkan. Pintu masuk atau gapura dari Desa Wisata Nongkosawit terlihat hampir rubuh dan tidak ada upaya perbaikan hingga saat ini. Permasalahan yang ada di Desa Wisata Nongkosawit tidak terkait sarana dan prasarana saja melainkan terdapat permasalahan-permasalahan lain, seperti gerak lambat pengelola Desa Wisata Nongkosawit.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung sebagai pengelola Desa Wisata Nongkosawit hanya memiliki 9 anggota. Sebagian besar pengelola Desa Wisata Nongkosawit adalah orang tua sehingga kurang pengetahuan tentang teknologi informasi, cara mengemas dan memasarkan produk Desa Wisata Nongkosawit. Pengelola Desa Wisata Nongkosawit selama ini hanya mengandalkan agen-agen pariwisata untuk menarik minat masyarakat agar berpariwisata di Desa Nongkosawit. Disisi lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mulai menghentikan anggaran untuk seluruh Desa Wisata mulai dari tahun 2018.

Potensi dan permasalahan Desa Nongkosawit menuntut masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Nongkosawit. Keterlibatan masyarakat pada sebuah program pembangunan perlu didukung dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri sebagai aset. Aset seperti itu penting dan bilamana dapat dioptimalkan akan menjadi modal sosial. Melihat bahwa pemerintah sudah tidak memberi perhatian untuk program Desa Wisata, termasuk Desa Nongkosawit maka dalam hal ini modal sosial menjadi penting bagi pelaksanaan program pembangunan swadaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Petra Claiborne, studi kasus di Bocas del Toro, Panama (dalam Kusuma, 2015) menunjukkan bahwa nilai modal sosial yang tinggi dalam partisipasi masyarakat dapat meningkatkan perkembangan pariwisata di lokasi tersebut. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkatkan perkembangan pariwisata di lokasi tersebut. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Boscas del Toro berangkat dari anggapan masyarakat yang menganggap pariwisata mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Anggapan ini membawa masyarakat untuk mengarah kepada perilaku kerjasama yang saling menguntungkan. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji tentang modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Desa Nongkosawit memiliki modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi modal sosial di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan, menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang

1.4.2 Bagi Pemerintah Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang membangun bagi Pemerintah Kota Semarang.

1.4.3 Bagi Universitas

Memperkaya koleksi penelitian ilmiah dan memberikan informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro yang akan melakukan berbagai penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan topik atau judul yang sama.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Administrasi publik

Felix dan Lloyd Nigro (dalam Kencana, 2006:24), administrasi publik mempunyai beberapa pengertian yaitu :

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam pemerintahan.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam penyusunan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut Goege J.Gordon (dalam Kencana, 2006:25), administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan pengadilan.

1.5.2 Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah administrasi negara dan publik yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan menyukkseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer teknologi, transformasi sosial, pengembangan kapasitas, dan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan (Indrawijaya dan Pranoto, 2011:24-25).

Berbeda halnya dengan Administrasi Negara yang menggunakan pendekatan legal dengan penekanannya pada keadaan yang tertib, efisien dan efektif maka Administrasi Pembangunan sesuai dengan peranannya tersebut menggunakan pendekatan ekologi, berorientasi pada tindakan dan juga berorientasi pada pemecahan masalah.

Katz (dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011:34) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya.

Siagian (dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011:35) mengemukakan arti pembangunan adalah :

- a. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Mengenai ruang lingkup Administrasi Pembangunan, Tjokroamidjojo (dalam Indrawijaya dan Pranoto, 2011:31) mengemukakan bahwa Administrasi Pembangunan mempunyai tiga fungsi yaitu:

- a. Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan Administrasi Negara yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana Administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "*administrative reform*"

- b. Perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta, pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development*.
- c. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan oleh kegiatan pemerintahan dan partisipasi dari masyarakat.

Indrawijaya dan Pranoto mengemukakan administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pembangunan, perumusan kebijakan-kebijakan perintah/negara sekarang masuk wilayah administrasi negara. Oleh karena itu, mekanisme dan tata kerja dalam proses analisis perumusan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan harus disempurnakan. Hal-hal tersebut termasuk ke dalam wilayah penyempurnaan administrasi yang diperlukan dalam proses perumusan kebijakan.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif, untuk ini diperlukan penyusunan instrumen-instrumen yang baik, seperti kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi-fungsi administrasi yang lain sebagai unsur pembaharuan, dan administrasi fungsional dalam arti sempit seperti: kepegawaian, pembiayaan pembangunan dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijakan dan program-program.

Berdasarkan konsep pembangunan yang dikemukakan oleh Hasbullah (dalam Pontoh, 2010) diketahui bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat dari beberapa model komunitas (*community capital*) yang terdiri dari :

- a. Modal Manusia (*human capital*) berupa kemampuan personal seperti pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan-keadaan terkait lainnya.
- b. Modal Sumberdaya Alam (*natural capital*) seperti perairan laut.
- c. Modal Ekonomi Produktif (*produced economy capital*) berupa aset ekonomi dan finansial dan aset lainnya.
- d. Modal Sosial (*social capital*) berupa norma/nilai, partisipasi dalam jaringan, *pro-activity*.

Beberapa literatur mengemukakan bahwa *human capital*, *natural capital*, dan *produced economy capital* telah banyak digarap oleh pemerintah, namun tidak demikian halnya dengan *social capital* yang selama ini masih banyak diabaikan. (Cernea, 1988; Jamasy, 2004; Hasbullah, 2006; dalam Pontoh 2010).

1.5.3 Modal Sosial

Field (dalam Usman, 2018:2-4) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis modal yang lazim diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan/atau manfaat sosial. Pertama, modal finansial. Pembahasan tentang finansial lazim dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan dana yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, organisasi, sebagai sumberdaya moneter yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan/atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif. Dalam konteks ini dana tersebut diposisikan sebagai sumber daya moneter yang bergerak sedemikian rupa

mengikuti sistem dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, menghitung resiko, dan prospek atau proyeksi ke depan.

Kedua, modal fisik. Pembahasan tentang modal fisik lazim dihubungkan dengan faktor produksi barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan ekonomi dan/atau manfaat sosial. Modal fisik dalam konteks ini adalah bahan baku serta sarana (infrastruktur) untuk mengolah bahan baku. Bahan baku tersebut bisa berasal dari sumber daya alam, bisa pula berupa tambang. Kemudian sarana (infrastruktur) dalam konteks ini bisa berupa mesin, gedung dan peralatan.

Ketiga, modal manusia. Pembahasan tentang modal manusia lazim dikaitkan dengan usaha mengelola, meningkatkan, dan mendayagunakan kepandaian, keterampilan, tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman sebagai sumber daya manusia yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif.

Keempat, modal sosial. Pembahasan tentang modal sosial lazim dikaitkan dengan upaya mengelola, meningkatkan dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan/atau manfaat sosial. Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, kepercayaan, serta jaringan yang saling menguntungkan. Karakteristik modal sosial berbeda dengan modal finansial, modal fisik, dan modal manusia. Modal fisik relatif kasat mata, dapat dihitung dan diprediksi. Kapasitas modal fisik dapat ditambah manakala diraskan kurang dan tidak mumpuni. Modal finansial dan modal manusia juga relatif kasat mata meskipun tidak sejelas modal fisik, sedangkan modal sosial bersifat tidak begitu

kasat mata. Modal sosial baru dapat diketahui keberadaannya atau dapat diidentifikasi gejalanya hanya apabila orang menjalin relasi-relasi sosial.

Cox (dalam Pontoh, 2010) menjelaskan bahwa modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efektif dan efisiennya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Hasbullah (dalam Pontoh, 2010) menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru.

Fukuyama (dalam Syahriar, 2015) mengemukakan *social capital* merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan yang paling mendasar, demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling besar, negara, dan dalam seluruh kelompok lain yang ada di antaranya.

Lebih jelas lagi Robert D. Putnam (dalam Supratiwi, 2013) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dari jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. Modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterikatan tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mudah bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif.

Beberapa defenisi yang diberikan para ahli tentang modal sosial secara garis besar menunjukkan bahwa modal sosial merupakan unsur pelumas yang sangat menentukan bagi terbangunnya kerjasama antar individu atau kelompok maupun terbangunnya suatu perilaku kerjasama kolektif. Dengan demikian modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan.

Halpem et al (dalam Aprilia, 2015) mengemukakan bahwa pembentukan modal sosial dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan bagian dari kebudayaan. Menurut Soekanto (dalam Aprilia, 2015:4) mengemukakan bahwa kebiasaan dalam kebudayaan dapat dilihat melalui unsur-unsur normatifnya, yaitu unsur-unsur yang menyangkut penilaian; unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya; dan unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan.

b. Kedudukan dan peranan individu

Peranan adalah aspek di mana dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan peranannya. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. (Soerjono Soekanto dalam Tarigan, 2013:10).

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pembangunan kualitas sumber daya manusia. M. J. Langeveld (dalam Rosidah, 2012: 12) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya membimbing manusia

yang belum dewasa untuk menjadi dewasa. Konsep tersebut bermakna pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing seseorang menuju kedewasaan dan kemandirian.

d. Kelas sosial dan kesenjangan ekonomi

Soekanto (dalam Aprilia, 2015:5) menjelaskan bahwa ukuran yang dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan masyarakat tertentu di antaranya pertama, ukuran ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang ditempuh seseorang. Semakin tinggi gelar yang didapat atau semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang maka akan menempati lapisan teratas. Kedua, ukuran kekayaan yang dapat dilihat melalui penghasilan yang dihasilkan seseorang.

e. Pola konsumsi dan Nilai-nilai personal

Henslin (dalam Aprilia, 2015:6) menyatakan bahwa pola konsumsi seseorang dapat mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Pada dasarnya, nilai mendasari preferensi seseorang, memandu pilihan seseorang dan mengindikasikan apa yang seseorang anggap berharga dalam hidup.

1.5.4 Desa Wisata

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian “desa”, baik dari struktur ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, dan atraksi-atraksi wisata (dalam Permanasari,

2011:11). Sementara itu, menurut Nuryati (dalam Permanasari, 2011:11), Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari ke khasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya seperti kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat istiadat, dsb, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis, yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya (Ika Putra dalam Darmawan, 2015:48)

Masing-masing desa wisata memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut sehingga layak dijadikan sebagai desa wisata. Adapun karakteristiknya menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman (dalam Darmawan, 2015: 49-50) adalah :

1. Desa dengan lingkungan alam, unsur kriterianya meliputi :
 - Keindahan alamnya,
 - Jenis sumber daya alam yang menonjol untuk kegiatan wisata,
 - Keunikan sumber daya alam.
2. Desa dengan kehidupan ekonomi/mata pencaharian:
 - Mata pencaharian penduduk utama yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata,
 - Kurangnya tingkat pengangguran masyarakat.

- Pemerataan yang berhubungan dengan hasil investasi lokal.
3. Desa dengan kehidupan adat/seni budaya
 - Tata cara adat sangat kental mendominasi kehidupan masyarakat.
 - Pengelolaan kegiatan seni budaya yang berlangsung di lingkungan desa dilakukan murni oleh masyarakat.
 - Kehidupan masyarakat sangat unik dan tradisional.
 4. Desa dengan bangunan tradisional
 - Bangunan khas dan unik. Arsitektur lokal sangat dominan.
 - Struktur tata ruang bersifat khas.
 - Pola lengkap serta material yang digunakan sangat alami menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian.
 - Interior peralatan makan dan minum menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas harus dioperasionalkan agar penelitian yang diajukan oleh penulis dapat dijalankan dan dilaksanakan. Fenomena pada penelitian ini berupa modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit.

1.6.1 Modal Sosial

Untuk dapat menganalisis nilai-nilai modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit adalah dengan mengamati beberapa nilai berikut:

1. *Trust* (Kepercayaan)

Pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu.

2. *Norms* (Norma)

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi oleh anggota masyarakat pada suatu etnis tertentu. Biasanya norma sosial akan dapat secara signifikan berperan dalam mengontrol setiap perilaku dalam masyarakat.

3. *Networks* (Jaringan kerja)

Terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya

1.6.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Modal Sosial

Faktor pendorong dan faktor penghambat dapat dilihat beberapa faktor determinan berikut:

1. Kebiasaan

Dapat dilihat melalui unsur-unsur normatifnya, yaitu unsur-unsur yang menyangkut penilaian; unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya; dan unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan.

2. Kedudukan dan peranan individu

Peranan individu yang memiliki kedudukan dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit.

3. Pendidikan

Peranan pendidikan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit

4. Kelas sosial dan kesenjangan ekonomi

Ukuran ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang ditempuh seseorang dan ukuran kekayaan yang dapat dilihat melalui penghasilan yang dihasilkan seseorang.

5. Pola konsumsi dan nilai-nilai personal

Pola konsumsi dapat dilihat melalui cara masyarakat dalam memprioritaskan kebutuhan hidupnya.

1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis dan merupakan acuan atau pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan :

Penelitian Pontoh (2010) tentang identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan kesimpulan bahwa masyarakat nelayan di Desa Gangga Dua masih merupakan masyarakat dengan karakter modal sosial terikat.

Tipologi modal sosial ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dari aspek ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Penelitian Supratiwi (2013) tentang Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menyatakan bahwa Desa Bendar memiliki empat modal sosial, yaitu *social trust*: nilai-nilai kerja keras dan keuletan; lembaga perekonomian bentukan masyarakat yang didasarkan sistem bagi hasil; serta modal sosial yang memiliki hubungan dengan aspek peranan kaum perempuan. Modal sosial ini bersinergi menjadi faktor internal yang mendukung meningkatkan perekonomian mereka.

Penelitian Aprilia (2015) tentang Modal Sosial Masyarakat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (Studi Kasus Program Perumahan Perumahan di Kawasan-kawasan Kumuh melalui Pengembangan Perumahan secara Vertikal di Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang menyimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan modal sosial di Rusunawa Kaligawe, yaitu kebiasaan, kedudukan dan peranan individu, pendidikan, kelas sosial dan kesenjangan ekonomi serta pola konsumsi individu dan nilai-nilai personal. Kebiasaan di Rusunawa Kaligawe di antaranya adalah membuang sampah sembarangan dan menunda pembayaran uang sewa. Bagi penghuni yang memiliki kedudukan sebagai ketua RT maupun RW akan berpengaruh terhadap lingkungan pergaulan, *prestise* maupun hak dan kewajibannya. Jenis pendidikan yang ditempuh penghuni Rusunawa Kaligawe adalah pendidikan formal dan non formal. Kelas sosial dan kesenjangan ekonomi dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh dan penghasilan yang diperoleh

penghuni Rusunawa Kaligawe. Pada pola konsumsi, penghuni Rusunawa Kaligawe seringkali menempatkan pembayaran uang sewa pada nomor sekian dalam daftar pengeluaran kebutuhannya.

Penelitian Kusuma (2015) tentang Modal Sosial Dalam Pengembangan di Desa Wisata Tembi Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa aspek jaringan di Desa Wisata Tembi membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, perangkat desa serta pihak swasta dengan pengelola Desa Wisata Tembi. Aspek *reciprocity* sudah berjalan baik dengan melibatkan dan melakukan *feedback* antara pengelola desa wisata, pengurus desa, pihak swasta serta masyarakat Desa Tembi. Aspek kepercayaan tergolong sudah baik. Sementara itu, aspek norma sosial berjalan kurang baik. Aspek nilai-nilai ditunjukkan dengan kesesuaian kegiatan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Modal sosial berperan aktif dalam pengelolaan Desa Wisata Tembi sehingga dapat mendukung terciptanya pengelolaan Desa Wisata Tembi menuju ke arah yang positif.

Sementara itu, pada penelitian Putri (2013) tentang Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mendapatkan kesimpulan bahwa gagasan perencanaan pembangunan Desa Wisata Nongkosawit telah dimulai sejak tahun 2009, namun karena proses perencanaannya harus melalui beberapa tahap maka memerlukan waktu yang tidak singkat untuk merealisasikannya. Perencanaan pembangunan Desa Wisata Nongkosawit juga masuk dalam usulan Musrembang, namun karena perencanaan pembangunan desa wisata tidak bisa dimasukkan dalam usulan Musrembang. Fungsi Musrembang

bagi perencanaan desa wisata terletak pada memprioritaskan usulan-usulan yang mendukung terealisasinya proyek desa wisata, seperti penyediaan prasarana dan sarana, infrastruktur dan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan kegiatan desa wisata. Pada penelitian ini, prioritas usulan Musrembang hanya berfokus di Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan saja.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Strauss & Corbin (2017:4) menuliskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupann, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi dua macam, adapun dua macam penelitian tersebut, yaitu :

1. Penelitian deskriptif, merupakan suatu pemecahan masalah dengan cara membandingkan gejala-gejala yang ditemukan menggunakan klasifikasi

gejala-gejala dan menetapkan pengaruh antara gejala-gejala yang ditentukan.

2. Penelitian Eksploratif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu, dengan maksud untuk merumuskan masalah-masalah terperinci.

Bogdan dan Taylor menyatakan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (dalam Prastowo, 2012:22). Maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan penekanan pada deskriptif dan analitis, yaitu untuk mendeskripsikan modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini mempunyai lokus di Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Pemilihan lokus tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan Desa Nongkosawit sebagai desa wisata dan masih sedikitnya penelitian yang mengambil lokus di Desa Wisata Nongkosawit. Penelitian ini mengambil fokus pada modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman

fenomena sosial yang diteliti. Subjek penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Nongkosawit Kota Semarang. Informan pada penelitian ini yaitu:

1. Staff/pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. Kelompok Sadar Wisata Kandang Gunung
3. Masyarakat Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Nasution (dalam Prastowo, 2012:43) mengungkapkan, dalam penelitian kualitatif diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kandang Gunung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mengobservasi pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit melalui diskusi dengan beberapa informan dan melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Wisata Nongkosawit.

2. Wawancara

Selain melalui observasi, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan dari peneliti kepada informan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (dalam Rofiq, 2013:87) yang

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata Kandang Gunung, Ketua RW (Rukun Warga) di Desa Nongkosawit dan ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

3. Kajian Dokumen

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lain yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan (Rofiq, 2013:88).

Pada penelitian ini penulis mengkaji beberapa dokumen antara lain Profil Kelompok Sadar Wisata Kandang Gunung, Data Monografi Kelurahan Nongkosawit dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen sebagai Desa Wisata Kota Semarang.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles dan Huberman dalam Ramdhany, 2016:85-88). Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

Pada penelitian ini penulis fokus pada data terkait modal sosial dalam pengelolaan Desa Wisata Nongkosawit.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, dalam Ramdhany, 2016:86)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, dalam Ramdhany 2016:86) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Ramdhany, 2016:87), membedakan empat macam triangulasi di antaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif (Patton, dalam Ramdhany 2016:87). Hal ini dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dari seorang informan, dicek kembali dengan bertanya kepada informan lain secara terus menerus sampai terjadi kejenuhan data yang artinya tidak ditemukan data baru lagi. Teknik triangulasi dilakukan melalui proses *crosscheck* pernyataan dari informan yang satu dengan informan yang lain.

3. Menarik Kesimpulan

Penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman pada kegiatan analisis ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori (Ramdhany, 2016).

1.8.8. Kualitas Data (goodness criteria)

Kualitas data merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif karena akan mempengaruhi kualitas penelitian. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sumber lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh. Triangulasi ditempuh peneliti menggunakan bahan referensi. Maksud dari penggunaan bahan referensi adalah peneliti menggunakan data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Selain itu, bahan referensi dapat juga berupa buku-buku referensi, berfungsi untuk membantu atau memberi wawasan pada peneliti dalam penyusunan laporan penelitian.